

# LAPORAN BULANAN BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI NTT

**FEBRUARI  
2025**



[badankeuanganprovntt@gmail.com](mailto:badankeuanganprovntt@gmail.com)



[www.reallygreatsite.com](http://www.reallygreatsite.com)

## KATA PENGANTAR

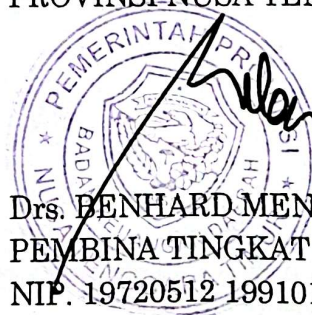
Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas Kasih Karunia-Nya, kami dapat menyusun Laporan Kinerja Bulan Februari Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2025.

Melalui Laporan Kinerja Bulanan Badan Keuangan Daerah ini diharapkan dapat mencerminkan kinerja Badan Keuangan Daerah selama Bulan Februari Tahun 2025, sekaligus dapat menjadi bahan informasi bagi berbagai pihak yang berminat untuk melihat dan mengukur pelaksanaan kinerja Perangkat Daerah.

Kami menyadari benar akan segala keterbatasan kemampuan dalam melaksanakan program pemerintah dimaksud. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun akan kami terima dengan terbuka.

Kupang, Maret 2025

Plt.KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,



Drs. BENHARD MENO, MT  
PEMBINA TINGKAT I (IV/B)  
NIP. 19720512 199101 1 001

## DAFTAR ISI

|                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| COVER                                                        |           |
| KATA PENGANTAR.....                                          | i         |
| DAFTAR ISI .....                                             | ii        |
| DAFTAR GAMBAR.....                                           | iii       |
| DAFTAR TABEL .....                                           | iv        |
| <br>                                                         |           |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                               | <b>1</b>  |
| 1.1 Latar Belakang .....                                     | 1         |
| 1.2 Dasar Hukum.....                                         | 1         |
| 1.3 Maksud Dan Tujuan .....                                  | 3         |
| 1.4 Organisasi dan Personalia .....                          | 3         |
| 1.5 Sistematika Penyajian .....                              | 6         |
| <br>                                                         |           |
| <b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....</b>       | <b>7</b>  |
| 2.1 Tugas dan Fungsi Organisasi Badan Keuangan Daerah .....  | 7         |
| 2.2 Target Kinerja.....                                      | 8         |
| 2.3 Perencanaan Anggaran Badan Keuangan Daerah TA. 2024..... | 10        |
| <br>                                                         |           |
| <b>BAB III PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN .....</b>        | <b>17</b> |
| 3.1 Pelayanan Administrasi Umum dan Kepegawaian .....        | 17        |
| A. Pelayanan Administrasi dan Umum.....                      | 17        |
| B. Kepegawaian .....                                         | 18        |
| 3.2 Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan.....              | 20        |
| A. Realisasi Anggaran pada Badan Keuangan Daerah.....        | 20        |
| 1. Realisasi Pendapatan .....                                | 20        |
| 2. Realisasi Belanja .....                                   | 26        |
| B. Kinerja Badan Keuangan Daerah.....                        | 32        |
| 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah .....        | 32        |
| 2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah .....                 | 37        |
| <br>                                                         |           |
| <b>BAB IV PENUTUP .....</b>                                  | <b>58</b> |
| 4.1 Permasalahan dan Solusi .....                            | 58        |
| 1. Sekretariat .....                                         | 58        |
| 2. Anggaran .....                                            | 59        |
| 3. Bidang Perbendaharaan .....                               | 60        |
| 3. Bidang Akuntansi dan Pelaporan .....                      | 61        |
| 4. Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota .....            | 61        |
| <br>                                                         |           |
| <b>BAB IV PENUTUP .....</b>                                  | <b>63</b> |

## **DAFTAR GAMBAR**

|                                                           |   |
|-----------------------------------------------------------|---|
| Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah..... | 5 |
|-----------------------------------------------------------|---|

## DAFTAR TABEL

|                                                                           |    |
|---------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Badan Keuangan Daerah .....             | 8  |
| 2.2 Penganggaran Badan Keuangan Daerah TA. 2024 .....                     | 10 |
| 3.1 Rekapitulasi Surat Masuk .....                                        | 17 |
| 3.2 Rekapitulasi Surat Keluar .....                                       | 17 |
| 3.3 Komposisi Pegawai berdasarkan Jabatan Struktural/Fungsional.....      | 18 |
| 3.4 Komposisi Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin dan Golongan .....        | 18 |
| 3.5 Komposisi Pegawai berdasarkan Agama.....                              | 19 |
| 3.6 Komposisi Pegawai berdasarkan Pendidikan Umum .....                   | 19 |
| 3.7 Komposisi Tenaga Kontrak .....                                        | 20 |
| 3.8 Realisasi Pendapatan pada Badan Keuangan.....                         | 20 |
| 3.9 Realisasi Anggaran Belanja pada Badan Keuangan Daerah.....            | 26 |
| 3.10 Hasil Pelaksanaan Tugas Bidang Anggaran.....                         | 38 |
| 3.11 Hasil Pelaksanaa Tugas Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota..... | 40 |
| 3.12 Hasil Pelaksanaa Tugas Bidang Perbendaharaan.....                    | 48 |
| 3.13 Hasil Pelaksanaan Tugas Bidang Akuntansi dan Pelaporan.....          | 55 |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan Pemerintah daerah di bidang keuangan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT pada Bulan Februari Tahun Anggaran 2025 telah melaksanakan berbagai program kegiatan dan berbagai program kegiatan tersebut dilaksanakan dengan maksud agar seluruh rencana program dan kegiatan dapat terealisasi, terarah dan tepat sasaran.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan pada Bulan Februari 2025 maka disusunlah Laporan Kinerja Badan Keuangan Daerah Bulan Februari Tahun Anggaran 2025 yang diharapkan dapat menjadi informasi tentang kinerja Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT sekaligus menjadi bahan masukan bagi peningkatan Akuntabilitas kinerja pada masa yang akan datang. Peningkatan kinerja diperlukan agar Badan Keuangan Daerah dapat lebih meningkatkan tugas dan fungsinya dalam rangka berperan memberikan dukungan teknis dan administrasi di bidang keuangan daerah.

#### **1.2 Dasar Hukum**

Dasar hukum pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
- c. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Nomor Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810)
  - d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
  - e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
  - f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah;
  - g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
  - i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya;
  - j. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  - k. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran



2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 006).

1. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 81 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024).

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Laporan Kinerja Bulan Februari Tahun Anggaran 2025 Badan Keuangan Daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Kinerja Bulan Februari Tahun Anggaran 2025 Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT adalah untuk menilai serta mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT dengan dasar evaluasi yang dilakukan, selanjutnya dirumuskan beberapa rekomendasi yang dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang guna peningkatan kinerja.

### **1.4 Organisasi dan Personalia**

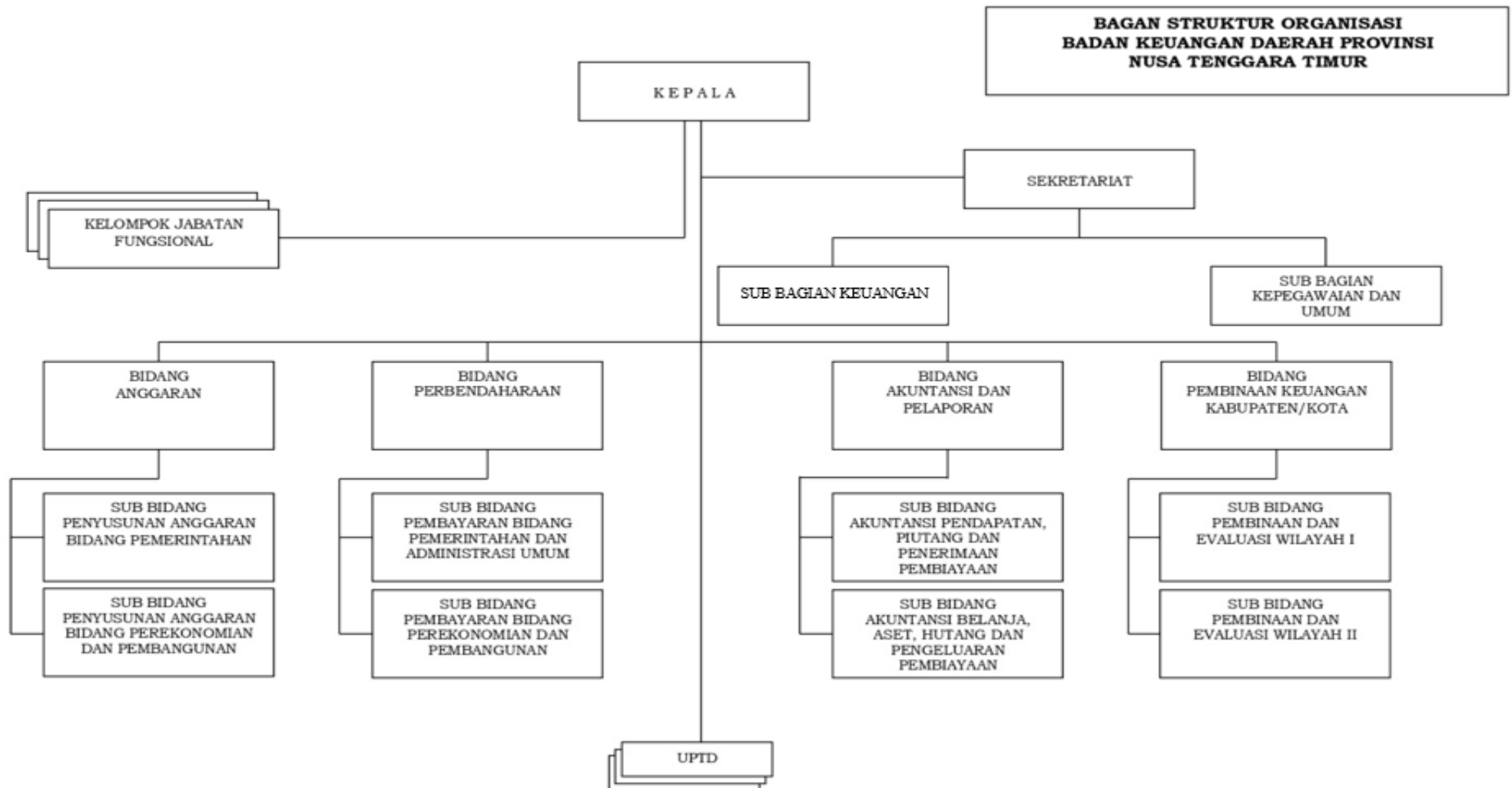
Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, struktur Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT terdiri dari :

- a. Sekretariat, terdiri atas :
  - 1) Sub Keuangan
  - 2) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
- b. Bidang Anggaran, terdiri atas :
  - 1) Sub Bidang Penyusunan Anggaran Bidang Pemerintahan.
  - 2) Sub Bidang Penyusunan Anggaran Bidang Perekonomian dan Pembangunan.
- c. Bidang Perbendaharaan, terdiri atas :



- 1) Sub Bidang Pembayaran Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum.
- 2) Sub Bidang Pembayaran Bidang Perekonomian dan Pembangunan.
- d. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri atas :
  - 1) Sub Bidang Akuntansi Pendapatan, Piutang dan Penerimaan Pembiayaan.
  - 2) Sub Bidang Akuntansi Belanja, Aset, Hutang dan Pengeluaran Pembiayaan.
- e. Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten /Kota, terdiri atas :
  - 1) Sub Bidang Pembinaan dan Evaluasi Wilayah I.
  - 2) Sub Bidang Pembinaan dan Evaluasi Wilayah II.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional tertentu.

Gambar 1.1



## **1.5 Sistematika Penyajian**

Pada dasarnya Kinerja Bulan Februari Tahun Anggaran 2025 ini secara umum menginformasikan capaian kinerja Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Bulan Februari Tahun Anggaran 2025. Membandingkan antara capaian kinerja dengan rencana kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan dari hasil analisis terhadap celah kinerja tersebut, dapat diperoleh masukan bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Dengan pola pikir dimaksud, sistematika penyajian Laporan Kinerja Bulan Februari Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Organisasi dan Personalia
- 1.5 Sistematika Penyajian

### **BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

- 2.1 Tugas dan Fungsi Badan Keuangan Daerah
- 2.2 Target Kinerja

### **BAB III PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

- 3.1 Pelayanan Administrasi Umum dan Kepegawaian
- 3.2 Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan

### **BAB IV PERMASALAHAN DAN SOLUSI**

- 4.1 Permasalahan
- 4.2 Solusi

### **BAB V PENUTUP**

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **2.1 Tugas dan Fungsi Badan Keuangan Daerah**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 95 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Badan Keuangan Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang Keuangan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Keuangan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang keuangan daerah.
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan daerah.
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan daerah.
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang keuangan daerah.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **2.2 Target Kinerja**

Pada tahun 2025, Perjanjian Kinerja Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT adalah untuk mewujudkan manajemen target kinerja jangka menengah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil.

Adapun Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BADAN KEUANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

## A. Sasaran Strategis Perangkat Daerah yang tertuang dalam RENSTRA/IKU Perangkat Daerah

| NO. | SASARAN STRATEGIS                                                                                 | INDIKATOR KINERJA                                                                                                     | TARGET |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1   | 2                                                                                                 | 3                                                                                                                     | 5      |
| 1.  | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif, Efisien, Transparan Dan Akuntabel | 1. Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang - Undangan | 100 %  |
|     |                                                                                                   | 2. Persentase Renperda APBD Kabupaten/Kota Yang Difasilitasi Tepat Waktu                                              | 100 %  |

## B. Pelaksanaan Anggaran

| No | Uraian                                           | Alokasi                        | Target                       |
|----|--------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 1. | APBD                                             |                                |                              |
| a. | <b>Belanja (Program)</b>                         | <b>Rp. 781.634.764.109,-</b>   | <b>Realisasi minimal 85%</b> |
|    | 1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | Rp. 18.188.331.972.-           | Realisasi minimal 90%        |
|    | 2. Pengelola Keuangan Daerah                     | Rp. 763.446.432.137,-          | Realisasi minimal 85%        |
| b. | <b>Pendapatan</b>                                | <b>Rp. 3.416.155.613.857,-</b> | <b>Realisasi minimal 90%</b> |
|    | <b>Jumlah Belanja+Pendapatan (APBD)</b>          | <b>Rp. 4.197.790.377.966,-</b> | <b>Realisasi minimal 90%</b> |

|  |                                                |       |   |
|--|------------------------------------------------|-------|---|
|  | 2. <b>APBN</b>                                 |       |   |
|  | a. <b>Program Dekonsentrasi</b>                | Rp. - | - |
|  | 1. Percepatan Pelaksanaan Pembangunan          | Rp. - | - |
|  | 2. Bina Administrasi Kewilayahan               | Rp. - | - |
|  | b. <b>Program Tugas Pembantuan</b>             | Rp. - | - |
|  |                                                |       |   |
|  | <b>Jumlah Dekonsentrasi + Tugas Pembantuan</b> | Rp. - | - |

### 2.3 Perencanaan Anggaran Badan Keuangan Daerah TA. 2025

Berdasarkan DPA Badan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2025, penganggaran Badan Keuangan dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut ini :

**Tabel 2.2**

#### **Perencanaan Anggaran Badan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2025**

|          |          |          |          |   |   |                                                                                       |                        |
|----------|----------|----------|----------|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|          |          |          |          |   |   | <b>KEUANGAN</b>                                                                       | <b>781.634.764.109</b> |
| <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2</b> |   |   | <b>Badan Keuangan Daerah</b>                                                          | <b>781.634.764.109</b> |
| <b>0</b> | <b>1</b> |          |          |   |   | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>                          | <b>18.188.331.972</b>  |
| 1        | 1        | 0        | 1        |   |   | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | 409.894.096            |
| 1        | 1        | 0        | 1        | 0 | 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | 65.246.000             |
| 1        | 1        | 0        | 1        | 0 | 2 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                            | 91.310.800             |
| 1        | 1        | 0        | 1        | 0 | 6 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 76.903.727             |
| 1        | 1        | 0        | 1        | 0 | 7 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | 76.433.569             |
| 1        | 1        | 0        | 1        | 0 | 8 | Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah                                | 50.000.000             |
| 1        | 1        | 0        | 1        | 1 | 0 | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah                          | 50.000.000             |
| <b>1</b> | <b>1</b> | <b>0</b> | <b>2</b> |   |   | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                         | <b>11.562.328.600</b>  |
| 1        | 1        | 0        | 2        | 0 | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | 9.070.629.000          |
| 1        | 1        | 0        | 2        | 0 | 2 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                         | 2.023.606.600          |
| 1        | 1        | 0        | 2        | 0 | 3 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      | 150.000.000            |
| 1        | 1        | 0        | 2        | 0 | 4 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                             | 75.330.000             |
| 1        | 1        | 0        | 2        | 0 | 5 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | 55.423.000             |



|          |          |          |          |   |    |                                                                                |                      |
|----------|----------|----------|----------|---|----|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1        | 1        | 0        | 2        | 0 | 6  | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                          | 65.519.000           |
| 1        | 1        | 0        | 2        | 0 | 7  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 75.509.000           |
| 1        | 1        | 0        | 2        | 0 | 8  | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                 | 46.312.000           |
| <b>1</b> | <b>1</b> | <b>0</b> | <b>3</b> |   |    | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                  | <b>20.000.000</b>    |
| 1        | 1        | 0        | 3        | 0 | 1  | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                      | 10.000.000           |
| 1        | 1        | 0        | 3        | 0 | 5  | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD              | 10.000.000           |
| <b>1</b> | <b>1</b> | <b>0</b> | <b>5</b> |   |    | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                               | <b>335.843.000</b>   |
| 1        | 1        | 0        | 5        | 0 | 3  | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                              | 141.079.000          |
| 1        | 1        | 0        | 5        | 0 | 5  | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                            | 91.079.000           |
| 1        | 1        | 0        | 5        | 0 | 9  | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                  | 50.000.000           |
| 1        | 1        | 0        | 5        | 0 | 11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                     | 53.685.000           |
| <b>1</b> | <b>1</b> | <b>0</b> | <b>6</b> |   |    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                      | <b>1.600.775.956</b> |
| 1        | 1        | 0        | 6        | 0 | 2  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                   | 41.079.000           |
| 1        | 1        | 0        | 6        | 0 | 3  | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                              | 26.189.000           |
| 1        | 1        | 0        | 6        | 0 | 5  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                        | 355.243.520          |
| 1        | 1        | 0        | 6        | 0 | 6  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                       | 72.500.000           |
| 1        | 1        | 0        | 6        | 0 | 7  | Penyediaan Bahan/Material                                                      | 200.000.000          |
| 1        | 1        | 0        | 6        | 0 | 8  | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                      | 454.729.000          |
| 1        | 1        | 0        | 6        | 0 | 9  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                           | 419.129.000          |

|          |          |          |          |   |    |                                                                                                                    |                        |
|----------|----------|----------|----------|---|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1        | 1        | 0        | 6        | 0 | 11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                             | 31.906.436             |
| <b>1</b> | <b>1</b> | <b>0</b> | <b>7</b> |   |    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                            | <b>234.824.000</b>     |
| 1        | 1        | 0        | 7        | 0 | 5  | Pengadaan Mebel                                                                                                    | 38.824.000             |
| 1        | 1        | 0        | 7        | 0 | 6  | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              | 196.000.000            |
| <b>1</b> | <b>1</b> | <b>0</b> | <b>8</b> |   |    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                        | <b>3.723.846.320</b>   |
| 1        | 1        | 0        | 8        | 0 | 1  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | 36.565.400             |
| 1        | 1        | 0        | 8        | 0 | 2  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 780.000.000            |
| 1        | 1        | 0        | 8        | 0 | 4  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 2.907.280.920          |
| <b>1</b> | <b>1</b> | <b>0</b> | <b>9</b> |   |    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | <b>300.820.000</b>     |
| 1        | 1        | 0        | 9        | 0 | 1  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 236.820.000            |
| 1        | 1        | 0        | 9        | 0 | 6  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 44.000.000             |
| 1        | 1        | 0        | 9        | 0 | 7  | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya                                                                                    | 20.000.000             |
| <b>0</b> | <b>2</b> |          |          |   |    | <b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>                                                                         | <b>763.446.432.137</b> |
| <b>2</b> | <b>2</b> | <b>0</b> | <b>1</b> |   |    | <b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>                                                           | <b>11.036.154.325</b>  |
| 2        | 2        | 0        | 1        | 0 | 1  | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS                                                                             | 473.651.000            |
| 2        | 2        | 0        | 1        | 0 | 2  | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS                                                         | 516.447.000            |
| 2        | 2        | 0        | 1        | 0 | 5  | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD                                                                     | 159.014.000            |
| 2        | 2        | 0        | 1        | 0 | 6  | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD                                                           | 367.722.800            |
| 2        | 2        | 0        | 1        | 0 | 7  | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD        | 3.049.323.362          |

|          |          |          |          |   |   |                                                                                                                                                                                                            |                      |
|----------|----------|----------|----------|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 2        | 2        | 0        | 1        | 0 | 8 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD                                                                            | 3.025.873.200        |
| 2        | 2        | 0        | 1        | 0 | 9 | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran                                                                                                                                         | 3.444.122.963        |
| <b>2</b> | <b>2</b> | <b>0</b> | <b>2</b> |   |   | <b>Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                                                                                                                | <b>2.272.027.005</b> |
| 2        | 2        | 0        | 2        | 0 | 1 | Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota                                                                                                                             | 1.000.000            |
| 2        | 2        | 0        | 2        | 0 | 2 | Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota                                                               | 434.038.000          |
| 2        | 2        | 0        | 2        | 0 | 3 | Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota                                           | 435.568.000          |
| 2        | 2        | 0        | 2        | 0 | 4 | Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | 452.694.000          |
| 2        | 2        | 0        | 2        | 0 | 5 | Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota                                                                                                                                                              | 732.006.500          |
| 2        | 2        | 0        | 2        | 0 | 6 | Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah                                                                                                                                                                | 1.000.000            |
| 2        | 2        | 0        | 2        | 0 | 7 | Asistensi Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota                                                                                                                                                         | 110.170.000          |
| 2        | 2        | 0        | 2        | 0 | 8 | Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota            | 1.000.000            |
| 2        | 2        | 0        | 2        | 0 | 9 | Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang                                 | 1.000.000            |

|          |          |          |          |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |
|----------|----------|----------|----------|---|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|          |          |          |          |   |    | Penjabaran Perubahan APBD<br>Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                                        |                      |
| 2        | 2        | 0        | 2        | 0 | 10 | Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan<br>Penyusunan dan Evaluasi Rancangan<br>Peraturan Daerah tentang<br>Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD<br>Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan<br>Kepala Daerah tentang Penjabaran<br>Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD<br>Kabupaten/Kota | 1.000.000            |
| 2        | 2        | 0        | 2        | 0 | 11 | Pembinaan Implementasi Sistem Informasi<br>Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan<br>Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                            | 1.000.000            |
| 2        | 2        | 0        | 2        | 0 | 12 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan<br>Pemerintah daerah Konsolidasian Provinsi dan<br>Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan<br>Pemerintah Daerah                                                                                                                           | 101.550.505          |
| <b>2</b> | <b>2</b> | <b>0</b> | <b>3</b> |   |    | <b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan<br/>Daerah</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>2.382.903.796</b> |
| 2        | 2        | 0        | 3        | 0 | 1  | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah                                                                                                                                                                                                                                              | 433.044.296          |
| 2        | 2        | 0        | 3        | 0 | 3  | Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan<br>Penerbitan Anggaran Kas dan SPD                                                                                                                                                                                                         | 322.607.600          |
| 2        | 2        | 0        | 3        | 0 | 5  | Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi,<br>Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan<br>Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya                                                                                                                                  | 404.848.400          |
| 2        | 2        | 0        | 3        | 0 | 7  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi<br>Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah,<br>Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan<br>Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran<br>Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)                                                                             | 631.832.200          |
| 2        | 2        | 0        | 3        | 0 | 8  | Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang<br>Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas,<br>Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan<br>Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi<br>Kas                                                                                                | 589.571.300          |

|          |          |          |          |   |    |                                                                                                                                                                                                                 |                        |
|----------|----------|----------|----------|---|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 2        | 2        | 0        | 3        | 0 | 10 | Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan                                                   | 1.000.000              |
| <b>2</b> | <b>2</b> | <b>0</b> | <b>4</b> |   |    | <b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>                                                                                                                                       | <b>2.671.638.502</b>   |
| 2        | 2        | 0        | 4        | 0 | 1  | Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah                                                                                                                                          | 1.000.000              |
| 2        | 2        | 0        | 4        | 0 | 2  | Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban                                                                                                 | 330.735.212            |
| 2        | 2        | 0        | 4        | 0 | 3  | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran                                                                                                            | 560.726.990            |
| 2        | 2        | 0        | 4        | 0 | 4  | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                                                                                  | 770.670.000            |
| 2        | 2        | 0        | 4        | 0 | 5  | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi | 1.006.506.300          |
| 2        | 2        | 0        | 4        | 0 | 9  | Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah                                                                                                                 | 1.000.000              |
| 2        | 2        | 0        | 4        | 0 | 11 | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban                                                                                                                                                           | 1.000.000              |
| <b>2</b> | <b>2</b> | <b>0</b> | <b>5</b> |   |    | <b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>                                                                                                                                                  | <b>745.083.708.509</b> |
| 2        | 2        | 0        | 5        | 0 | 4  | Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah                                                                                                              | 47.206.923.484         |
| 2        | 2        | 0        | 5        | 0 | 8  | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan                                                                                                                                                            | 46.356.898.400         |

|   |   |   |   |   |    |                                       |                 |
|---|---|---|---|---|----|---------------------------------------|-----------------|
| 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 9  | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | 22.180.954.686  |
| 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 10 | Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi  | 629.338.931.939 |

**BAB III**  
**PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

**3.1 Pelayanan Administrasi Umum dan Kepegawaian**

**A. Pelayanan Administrasi dan Umum**

**1. Surat Masuk**

**Tabel 3.1**  
**Rekapitulasi Surat Masuk Badan Keuangan Daerah Prov. NTT**  
**Per 28 Februari 2025**

| <b>Unit</b>                           | <b>Jumlah Surat Masuk</b> |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Sekretariat                           | 58                        |
| Bidang Anggaran                       | 69                        |
| Bidang Akuntansi dan Pelaporan        | 53                        |
| Bidang Pembinaan Keuangan<br>Kab/Kota | 15                        |
| Bidang Perbendaharaan                 | 109                       |
| <b>Jumlah</b>                         | <b>304</b>                |

*Sumber : Sekretariat Badan Keuangan Daerah Prov. NTT*

**2. Surat Keluar**

**Tabel 3.2**  
**Rekapitulasi Surat Keluar Badan Keuangan Daerah Prov. NTT**  
**28 Februari 2025**

| <b>Unit</b>                           | <b>Jumlah Surat Keluar</b> |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Sekretariat                           | 58                         |
| Bidang Anggaran                       | 7                          |
| Bidang Akuntansi dan Pelaporan        | 17                         |
| Bidang Pembinaan Keuangan<br>Kab/Kota | 13                         |
| Bidang Perbendaharaan                 | 31                         |
| <b>Jumlah</b>                         | <b>126</b>                 |

*Sumber : Sekretariat Badan Keuangan Daerah Prov. NTT*

## B. Kepegawaian

Keadaan pegawai pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur berjumlah 64 orang, dengan perincian sebagai berikut (sampai dengan 28 Februari 2025 ).

### 1. Berdasarkan Jabatan Struktural/Fungsional

**Tabel 3.3**

#### **Komposisi Pegawai berdasarkan Jabatan Struktural/Fungsional**

**Kondisi 28 Februari 2025**

| NO           | JABATAN                         | JUMLAH          | TINGKATAN<br>(eselon/<br>jenjang) | Ket       |
|--------------|---------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------|
| 1.           | Kepala Badan                    | 0 orang         | II-a                              | Tidak Ada |
| 2.           | Sekretaris                      | 0 orang         | III-a                             | Tidak Ada |
| 3.           | Kepala Bidang                   | 3 orang         | III-a                             | Ada       |
| 4.           | Kepala Sub<br>Bagian/Sub Bidang | 9 orang         | IV-a                              | Ada       |
| 5.           | Fungsional Tertentu             | 8 orang         |                                   | Ada       |
| 6            | Pelaksana                       | 43 orang        |                                   |           |
| <b>Total</b> |                                 | <b>64 orang</b> |                                   |           |

*Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Keuangan Daerah Prov. NTT*

### 2. Berdasarkan Jenis Kelamin dan Golongan

**Tabel 3.4**

#### **Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin dan Golongan**

**Kondisi 28 Februari 2025**

| NO           | UNIT KERJA                                  | JENIS<br>KELAMIN |    | GOLONGAN  |    |     |    |
|--------------|---------------------------------------------|------------------|----|-----------|----|-----|----|
|              |                                             | L                | P  | I         | II | III | IV |
| 1.           | Sekretariat                                 | 6                | 7  | -         | 1  | 11  | 1  |
| 2.           | Bidang Anggaran                             | 7                | 4  | -         | -  | 8   | 3  |
| 3.           | Bidang Perbendaharaan                       | 3                | 10 | -         | -  | 13  | 0  |
| 4.           | Bidang Akuntansi dan<br>Pelaporan           | 3                | 10 | -         | -  | 11  | 3  |
| 5.           | Bidang Pembinaan Keuangan<br>Kabupaten/Kota | 8                | 6  | -         | 1  | 10  | 2  |
| Jumlah       |                                             | 27               | 37 |           | 2  | 53  | 9  |
| <b>Total</b> |                                             | <b>64</b>        |    | <b>64</b> |    |     |    |

*Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Keuangan Daerah Prov. NTT*



### 3. Berdasarkan Agama

**Tabel 3.5**  
**Komposisi Pegawai Berdasarkan Agama**  
**Kondisi 28 Februari 2025**

| NO            | UNIT KERJA                               | AGAMA     |    |       |       |       |
|---------------|------------------------------------------|-----------|----|-------|-------|-------|
|               |                                          | KP        | KK | Islam | Hindu | Budha |
| 1.            | Sekretariat                              | 6         | 6  | 1     | -     | -     |
| 2.            | Bidang Anggaran                          | 5         | 6  | -     | -     | -     |
| 3.            | Bidang Perbendaharaan                    | 6         | 6  | 1     | -     | -     |
| 4.            | Bidang Akuntansi dan Pelaporan           | 6         | 7  | 1     | -     | -     |
| 5.            | Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota | 10        | 1  | 1     | 1     | -     |
| <i>Jumlah</i> |                                          | 33        | 26 | 4     | 1     | -     |
| <b>Total</b>  |                                          | <b>64</b> |    |       |       |       |

*Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Keuangan Daerah Prov. NTT*

### 4. Berdasarkan Pendidikan

**Tabel 3.6**  
**Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan Umum**  
**Kondisi 28 Februari 2025**

| NO            | UNIT KERJA                               | TINGKAT PENDIDIKAN |      |      |                   |      |    |    |
|---------------|------------------------------------------|--------------------|------|------|-------------------|------|----|----|
|               |                                          | SD                 | SLTP | SLTA | D.I<br>II/<br>III | D.IV | S1 | S2 |
| 1.            | Sekretariat                              | -                  | -    | 2    | -                 | 1    | 8  | 2  |
| 2.            | Bidang Anggaran                          | -                  | -    | -    | 1                 | -    | 7  | 3  |
| 3.            | Bidang Perbendaharaan                    | -                  | -    | -    | 3                 | -    | 9  | 1  |
| 4.            | Bidang Akuntansi dan Pelaporan           | -                  | -    | -    | 1                 | -    | 7  | 6  |
| 5.            | Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota | -                  | -    | 3    | -                 | 1    | 5  | 4  |
| <i>Jumlah</i> |                                          | -                  | -    | 5    | 5                 | 2    | 36 | 16 |
| <b>Total</b>  |                                          | <b>64</b>          |      |      |                   |      |    |    |

*Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Keuangan Daerah Prov. NTT*

## 5. Tenaga Kontrak

**Tabel 3.7.**  
**Komposisi Tenaga Kontrak Daerah**  
**Kondisi 28 Februari 2025**

| NO           | TENAGA KONTRAK | JUMLAH          |
|--------------|----------------|-----------------|
| 1.           | LAKI-LAKI      | 38              |
| 2            | PEREMPUAN      | 30              |
| <b>Total</b> |                | <b>68 orang</b> |

*Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Keuangan Daerah Prov. NTT*

### 3.2 Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan

#### A. Realisasi Anggaran pada Badan Keuangan Daerah

##### 1. Realisasi Pendapatan

Pada Tahun Anggaran 2025, Target Pendapatan Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT sebesar **Rp. 3.416.135.171.857,-**. Berikut adalah realisasi Pendapatan Daerah kondisi 28 Februari 2025:

**Tabel. 3.8**  
**Realisasi Pendapatan pada Badan Keuangan Daerah**  
**Kondisi 28 Februari 2025**

| KODE        | URAIAN                                                                              | ANGGARAN                 | REALISASI              | %            |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|
| <b>4.</b>   | <b>PENDAPATAN DAERAH</b>                                                            | <b>3.416.135.171.857</b> | <b>635.125.547.563</b> | <b>18,59</b> |
| <b>4.1.</b> | <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>                                                 | <b>119.519.178.857</b>   | <b>1.153.242.663</b>   | <b>2,02</b>  |
| 4.1.03.     | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan                                   | 62.519.178.857           |                        |              |
| 4.1.03.01.  | Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal | 62.519.178.857           |                        |              |

| KODE               | URAIAN                                                                                                           | ANGGARAN       | REALISASI     | %    |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|------|
|                    | pada BUMN                                                                                                        |                |               |      |
| 4.1.03.01.01.0001. | Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) | 62.250.000.000 |               |      |
| 4.1.03.02.02.0001  | Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta | 269.178.857    |               |      |
| 4.1.04.            | Lain-lain PAD yang Sah                                                                                           | 57.000.000.000 | 1.153.242.663 | 2,02 |
| 4.1.04.05.         | Jasa Giro                                                                                                        | 5.000.000.000  | 292.809.218   | 5,86 |
| 4.1.04.05.01.      | Jasa Giro pada Kas Daerah                                                                                        | 5.000.000.000  | 292.809.218   | 5,86 |
| 4.1.04.05.01.0001. | Jasa Giro pada Kas Daerah                                                                                        | 5.000.000.000  | 292.809.218   | 5,86 |
| 4.1.04.07.         | Pendapatan Bunga                                                                                                 | 1.000.000.000  |               |      |
| 4.1.04.07.01.      | Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah                                                          | 1.000.000.000  |               |      |
| 4.1.04.07.01.0001. | Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah                                                          | 1.000.000.000  |               |      |
| 4.1.04.08.         | Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah                                                          | 30.000.000.000 | 121.918.323   | 0,41 |
| 4.1.04.08.01.      | Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara                                                                | 30.000.000.000 | 121.918.323   | 0,41 |
| 4.1.04.08.01.0001. | Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara                                                                | 30.000.000.000 | 121.918.323   | 0,41 |
| 4.1.04.11.         | Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan                                                        | 10.000.000.000 | 100.516.595   | 1,01 |
| 4.1.04.11.01.      | Pendapatan Denda atas                                                                                            | 10.000.000.000 | 100.516.595   | 1,01 |

| KODE               | URAIAN                                                                                                  | ANGGARAN          | REALISASI       | %     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------|
|                    | Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan                                                                     |                   |                 |       |
| 4.1.04.11.01.0001. | Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan                                               | 10.000.000.000    | 100.516.595     | 1,01  |
| 4.1.04.15.         | Pendapatan dari Pengembalian                                                                            | 11.000.000.000    | 637.998.527     | 5,80  |
| 4.1.04.15.01.      | Pendapatan dari Pengembalian kelebihan pembayaran gaji pokok ASN                                        | 1.000.000.000     |                 |       |
| 4.1.04.15.01.0001. | Pendapatan dari Pengembalian kelebihan pembayaran gaji pokok ASN                                        | 1.000.000.000,    |                 |       |
| 4.1.04.15.03.      | Pendapatan dari Pengembalian kelebihan belanja tunjangan pph/tunjangan khusus /tunjangan PPPK           |                   |                 |       |
| 4.1.04.15.03.0001. | Pendapatan dari Pengembalian kelebihan belanja tunjangan pph/tunjangan khusus /tunjangan PPPK           |                   |                 |       |
| 4.1.04.15.04.      | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas                                      | 10.000.000.000    | 637.998.527     | 6,38  |
| 4.1.04.15.04.0001. | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Biasa | 10.000.000.000    | 637.998.527     | 6,38  |
| 4.2.               | PENDAPATAN TRANSFER                                                                                     | 3.296.615.993.000 | 633.866.229.900 | 19,23 |
| 4.2.01.            | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat                                                                    | 3.296.615.993.000 | 633.866.229.900 | 44,34 |
| 4.2.01.01.         | Dana Perimbangan                                                                                        | 3.296.615.993.000 | 633.866.229.900 | 44,34 |

| KODE               | URAIAN                                                                 | ANGGARAN          | REALISASI       | %     |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------|
| 4.2.01.01.01.      | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)                               | 61.631.985.000    | 153.488.400     | 0,25  |
| 4.2.01.01.01.0001. | DBH Pajak Bumi dan Bangunan                                            | 4.059.812.000     |                 |       |
| 4.2.01.01.01.0003. | DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN                                   | 48.258.335.000    |                 |       |
| 4.2.01.01.01.0004. | DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)                                         | 7.760.954.000     |                 |       |
| 4.2.01.01.01.0007. | DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi                      | 1.064.825.000     | 104.682.500     | 9,83  |
| 4.2.01.01.01.0008. | DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent               | 397.747.000       | 39.774.700      | 10,00 |
| 4.2.01.01.01.0010. | DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) | 90.312.000        | 9.031.200       | 10,00 |
| 4.2.01.01.02.      | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)                             | 2.132.047.308.000 | 385.716.630.000 | 18,09 |
| 4.2.01.01.02.0001. | DAU tidak ditentukan penggunaannya                                     | 1.542.866.521.000 | 385.716.630.000 | 25,00 |
| 4.2.01.01.02.0004  | DAU tambahan dukungan Pendanaan atas Penggajian PPPK                   |                   |                 |       |
| 4.2.01.01.02.0005  | DAU yg ditentukan penggunaannya bidang Pendidikan                      | 445.245.671.000   |                 |       |
| 4.2.01.01.02.0006  | DAU yg ditentukan penggunaannya bidang Kesehatan                       | 41.141.397.000    |                 |       |
| 4.2.01.01.02.0007  | DAU yg ditentukan penggunaannya bidang Pekerjaan Umum                  | 102.793.719.000   |                 |       |
| 4.2.01.01.03.      | DANA ALOKASI KHUSUS                                                    | 133.541.747.000   | 375.000.000     | 0,28  |
| 4.2.01.01.03.0004. | DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-SMA                               | 133.541.747.000   |                 |       |
| 4.2.01.01.03.0005. | DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-SLB                               |                   |                 |       |
| 4.2.01.01.03.0051  | DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-SMK                               |                   |                 |       |

| KODE                 | URAIAN                                                                                                      | ANGGARAN               | REALISASI              | %            |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------|
| 4.2.01.01.03.0011    | DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan                                                            |                        | 375.000.000            |              |
| 4.2.01.01.03.0058    | DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB -Reguler Penguatan stunting                                               |                        |                        |              |
| 4.2.01.01.03.0060    | DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB -Reguler Penguatan Kesehatan                                              |                        |                        |              |
| 4.2.01.01.03.0030    | DAK Fisik Bidang Industri Kecil dan Menengah -penugasan- pembangunan sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM |                        |                        |              |
| 4.2.01.01.03.0031    | DAK Fisik Bidang Pertanian Penugasan/Renovasi sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian        |                        |                        |              |
| 4.2.01.01.03.0032    | DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan                                                           |                        |                        |              |
| 4.2.01.01.03.0034    | DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan                                                                        |                        |                        |              |
| 4.2.01.01.03.0035    | DAK Fisik Bidang Jalan- Penugasan                                                                           |                        |                        |              |
| 4.2.01.01.03.0036    | DAK Fisik-Bidang jalan- penugasan Keselamatan jalan                                                         |                        |                        |              |
| 4.2.01.01.03.0043    | DAK Fisik-Bidang irigasi penugasan                                                                          |                        |                        |              |
| 4.2.01.01.03.0046    | DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan Kehutanan                                         |                        |                        |              |
| 4.2.01.01.03.0063    | DAK Fisik-Bidang Transportasi Perairan Penugasan                                                            |                        |                        |              |
| 4.2.01.01.03.0065    | DAK Fisik-Bidang Infrastruktur Energi Terbarukan                                                            |                        |                        |              |
| <b>4.2.01.01.04.</b> | <b>Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik</b>                                             | <b>962.694.182.000</b> | <b>247.621.111.500</b> | <b>25,72</b> |

| KODE                      | URAIAN                                                        | ANGGARAN             | REALISASI       | %     |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-------|
| 4.2.01.01.04.0001.        | DAK Non Fisik-BOS Reguler                                     | 962.694.182.000      | 247.621.111.500 | 25,72 |
| 4.2.01.01.04.0003.        | DAK Non Fisik-BOS Kinerja                                     |                      |                 |       |
| 4.2.01.01.04.0004.        | DAK Non Fisik-TPG PNSD                                        |                      |                 |       |
| 4.2.01.01.04.0005.        | DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD                                |                      |                 |       |
| 4.2.01.01.04.0006.        | DAK Non Fisik-TKG PNSD                                        |                      |                 |       |
| 4.2.01.01.04.0009.        | DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum              |                      |                 |       |
| 4.2.01.01.04.0010.        | DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya        |                      |                 |       |
| 4.2.01.01.04.0011.        | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK                                       |                      |                 |       |
| 4.2.01.01.04.0020         | DAK Non Fisik-Dana Bantuan BLPS                               |                      |                 |       |
| 4.2.01.01.04.0022         | Dana Pelayanan Perlindungan Anak                              |                      |                 |       |
| 4.2.01.01.04.0024         | DAK Non Fisik Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM |                      |                 |       |
| 4.2.01.01.04.0016         | DAK Non Fisik-PK2UKM                                          |                      |                 |       |
| <b>4.2.01.06.01.0001.</b> | <b>DANA INSENTIF FISKAL</b>                                   | <b>6.700.771.000</b> |                 |       |
| 4.2.01.06.01.0001.        | Dana Insentif Fiskal                                          | 6.700.771.000        |                 |       |
| <b>4.3.</b>               | <b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>                   |                      | 106.075.000     |       |
| 4.3.01.                   | Pendapatan Hibah                                              |                      | 106.075.000     |       |
| 4.3.01.01.01.0001.        | Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat                        |                      | 106.075.000     |       |
| 4.3.01.04.01.0001.        | Pendapatan Hibah dari Badan / Lembaga / Organisasi Swasta     |                      | 106.075.000     |       |

| KODE               | URAIAN                                                 | ANGGARAN                 | REALISASI              | %            |
|--------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|
|                    | Dalam Negeri                                           |                          |                        |              |
| 4.3.01.03.01.0001. | Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat / Perorangan |                          | 106.075.000            |              |
|                    | <b>JUMLAH</b>                                          | <b>3.416.135.171.857</b> | <b>635.125.547.563</b> | <b>18,59</b> |

*Sumber Bidang Perbendaharaan (BUD)*

## 2. Realisasi Anggaran Belanja berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025 Nomor : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.03.0000/001/2025, Belanja Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Tahun Anggaran 2025 sebesar **Rp. 781.634.764.109,-** Pagu dan Realisasi Anggaran tercantum pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.9**

### **Realisasi Anggaran Belanja pada Badan Keuangan Daerah**

**Kondisi 28 Februari 2025**

| NO |   |   |   |   |   | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Pagu                   | Realisasi            | %            |
|----|---|---|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|--------------|
|    |   |   |   |   |   | <b>KEUANGAN</b>                                                             | <b>781.634.764.109</b> | <b>1.338.371.954</b> | <b>0,17%</b> |
| 0  | 0 | 0 | 2 |   |   | <b>Badan Keuangan Daerah</b>                                                | <b>781.634.764.109</b> | <b>1.338.371.954</b> | <b>0,17%</b> |
| 0  | 1 |   |   |   |   | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>                | <b>18.188.331.972</b>  | <b>490.416.427</b>   | <b>2,70%</b> |
| 1  | 1 | 0 | 1 |   |   | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah            | 409.894.096            | 58.310.000           | 14,23%       |
| 1  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                             | 65.246.000             | 30.454.000           | 46,68%       |
| 1  | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                  | 91.310.800             |                      | 0,00%        |
| 1  | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan                       | 76.903.727             | 27.856.000           | 36,22%       |



| NO       |          |          |          |          |          | Urusan/ Bidang Urusan<br>Pemerintahan Daerah dan<br>Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Pagu                  | Realisasi         | %             |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------|
|          |          |          |          |          |          | Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                   |                       |                   |               |
| 1        | 1        | 0        | 1        | 0        | 7        | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                 | 76.433.569            |                   | 0,00%         |
| 1        | 1        | 0        | 1        | 0        | 8        | Pelaksanaan pengumpulan data statistik sektoral daerah                            | 50.000.000            |                   | 0,00%         |
| 1        | 1        | 0        | 1        | 0        | 10       | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah                      | 50.000.000            |                   | 0,00%         |
| <b>1</b> | <b>1</b> | <b>0</b> | <b>2</b> |          |          | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                     | <b>11.562.328.600</b> | <b>69.007.200</b> | <b>0,60%</b>  |
| 1        | 1        | 0        | 2        | 0        | 1        | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                 | 9.070.629.000         |                   | 0,00%         |
| 1        | 1        | 0        | 2        | 0        | 2        | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                     | 2.023.606.600         |                   | 0,00%         |
| 1        | 1        | 0        | 2        | 0        | 3        | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                  | 150.000.000           | 21.939.000        | 14,63%        |
| 1        | 1        | 0        | 2        | 0        | 4        | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                         | 75.330.000            |                   | 0,00%         |
| 1        | 1        | 0        | 2        | 0        | 5        | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                       | 55.423.000            | 28.724.000        | 51,83%        |
| 1        | 1        | 0        | 2        | 0        | 6        | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                             | 65.519.000            | 18.344.200        | 28,00%        |
| 1        | 1        | 0        | 2        | 0        | 7        | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD    | 75.509.000            |                   | 0,00%         |
| 1        | 1        | 0        | 2        | 0        | 8        | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                    | 46.312.000            |                   | 0,00%         |
| <b>1</b> | <b>1</b> | <b>0</b> | <b>3</b> |          |          | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                     | <b>20.000.000</b>     | <b>4.264.000</b>  | <b>21,32%</b> |
| 1        | 1        | 0        | 3        | 0        | 1        | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                         | 10.000.000            |                   | 0,00%         |
| <b>1</b> | <b>1</b> | <b>0</b> | <b>3</b> | <b>0</b> | <b>5</b> | <b>Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</b>          | <b>10.000.000</b>     | <b>4.264.000</b>  | <b>42,64%</b> |
| <b>1</b> | <b>1</b> | <b>0</b> | <b>5</b> |          |          | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                  | <b>335.843.000</b>    | <b>34.981.860</b> | <b>10,42%</b> |
| 1        | 1        | 0        | 5        | 0        | 3        | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                 | 141.079.000           | 29.187.660        | 20,69%        |
| 1        | 1        | 0        | 5        | 0        | 5        | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                               | 91.079.000            | 5.794.200         | 6,36%         |
| 1        | 1        | 0        | 5        | 0        | 9        | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                     | 50.000.000            |                   | 0,00%         |

| NO       |          |          |          |   |    | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                        | Pagu                   | Realisasi          | %             |
|----------|----------|----------|----------|---|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|---------------|
| 1        | 1        | 0        | 5        | 0 | 11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                                                         | 53.685.000             |                    | 0,00%         |
| <b>1</b> | <b>1</b> | <b>0</b> | <b>6</b> |   |    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                          | <b>1.600.775.956</b>   | <b>274.672.088</b> | <b>17,16%</b> |
| 1        | 1        | 0        | 6        | 0 | 2  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                       | 41.079.000             | 100.000            | 0,24%         |
| 1        | 1        | 0        | 6        | 0 | 3  | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                  | 26.189.000             |                    | 0,00%         |
| 1        | 1        | 0        | 6        | 0 | 5  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                            | 355.243.520            | 62.424.207         | 17,57%        |
| 1        | 1        | 0        | 6        | 0 | 6  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                           | 72.500.000             | 9.780.000          | 13,49%        |
| 1        | 1        | 0        | 6        | 0 | 7  | Penyediaan Bahan/Material                                                                                          | 200.000.000            | 67.083.635         | 33,54%        |
| 1        | 1        | 0        | 6        | 0 | 8  | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                          | 454.729.000            | 81.925.926         | 18,02%        |
| 1        | 1        | 0        | 6        | 0 | 9  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               | 419.129.000            | 53.358.320         | 12,73%        |
| 1        | 1        | 0        | 6        | 0 | 11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                             | 31.906.436             |                    | 0,00%         |
| <b>1</b> | <b>1</b> | <b>0</b> | <b>7</b> |   |    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                            | <b>234.824.000</b>     |                    | <b>0,00%</b>  |
| 1        | 1        | 0        | 7        | 0 | 5  | Pengadaan Mebel                                                                                                    | 38.824.000             |                    | 0,00%         |
| 1        | 1        | 0        | 7        | 0 | 6  | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              | 196.000.000            |                    | 0,00%         |
| <b>1</b> | <b>1</b> | <b>0</b> | <b>8</b> |   |    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                        | <b>3.723.846.320</b>   | <b>2.542.000</b>   | <b>0,07%</b>  |
| 1        | 1        | 0        | 8        | 0 | 1  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | 36.565.400             | 542.000            | 1,48%         |
| 1        | 1        | 0        | 8        | 0 | 2  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 780.000.000            |                    | 0,00%         |
| 1        | 1        | 0        | 8        | 0 | 4  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 2.907.280.920          | 2.000.000          | 0,07%         |
| <b>1</b> | <b>1</b> | <b>0</b> | <b>9</b> |   |    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | <b>300.820.000</b>     | <b>46.639.279</b>  | <b>15,50%</b> |
| 1        | 1        | 0        | 9        | 0 | 1  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 236.820.000            | 37.444.979         | 15,81%        |
| 1        | 1        | 0        | 9        | 0 | 6  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 44.000.000             | 9.194.300          | 20,90%        |
| 1        | 1        | 0        | 9        | 0 | 7  | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya                                                                                    | 20.000.000             |                    | 0,00%         |
| <b>0</b> | <b>2</b> |          |          |   |    | <b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>                                                                         | <b>763.446.432.137</b> | <b>847.955.527</b> | <b>0,11%</b>  |

| NO |   |   |   |   |   | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                                                            | Pagu                  | Realisasi          | %            |
|----|---|---|---|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 2  | 2 | 0 | 1 |   |   | <b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>                                                                                                                               | <b>11.036.154.325</b> | <b>422.477.454</b> | <b>3,83%</b> |
| 2  | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS                                                                                                                                                 | 473.651.000           |                    | 0,00%        |
| 2  | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS                                                                                                                             | 516.447.000           |                    | 0,00%        |
| 2  | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD                                                                                                                                        | 159.014.000           | 96.189.100         | 60,49%       |
| 2  | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD                                                                                                                               | 367.722.800           |                    | 0,00%        |
| 2  | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD                                                                            | 3.049.323.362         |                    | 0,00%        |
| 2  | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD                                                        | 3.025.873.200         | 277.788.354        | 9,18%        |
| 2  | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran                                                                                                                     | 3.444.122.963         | 48.500.000         | 1,41%        |
| 2  | 2 | 0 | 2 |   |   | <b>Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                                                                                            | <b>2.272.027.005</b>  | <b>37.358.000</b>  | <b>1,64%</b> |
| 2  | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota                                                                                                         | 1.000.000             |                    | 0,00%        |
| 2  | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota                                           | 434.038.000           |                    | 0,00%        |
| 2  | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota                       | 435.568.000           |                    | 0,00%        |
| 2  | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan | 452.694.000           |                    | 0,00%        |

| NO |   |   |   |   |    | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                   | Pagu                 | Realisasi          | %            |
|----|---|---|---|---|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------|
|    |   |   |   |   |    | APBD Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                    |              |
| 2  | 2 | 0 | 2 | 0 | 5  | Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                 | 732.006.500          | 4.237.000          | 0,58%        |
| 2  | 2 | 0 | 2 | 0 | 6  | sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah                                                                                                                                                                                                                   | 1.000.000            |                    | 0,00%        |
| 2  | 2 | 0 | 2 | 0 | 7  | Asistensi Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                            | 110.170.000          | 24.532.000         | 22,27%       |
| 2  | 2 | 0 | 2 | 0 | 8  | Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota                                                               | 1.000.000            |                    | 0,00%        |
| 2  | 2 | 0 | 2 | 0 | 9  | Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota                                           | 1.000.000            |                    | 0,00%        |
| 2  | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | 1.000.000            |                    | 0,00%        |
| 2  | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                             | 1.000.000            |                    | 0,00%        |
| 2  | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah                                                                                                               | 101.550.505          | 8.589.000          | 8,46%        |
| 2  | 2 | 0 | 3 |   |    | <b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>2.382.903.796</b> | <b>180.721.255</b> | <b>7,58%</b> |
| 2  | 2 | 0 | 3 | 0 | 1  | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah                                                                                                                                                                                                                         | 433.044.296          | 87.319.380         | 20,16%       |
| 2  | 2 | 0 | 3 | 0 | 3  | Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan                                                                                                                                                                                                            | 322.607.600          |                    | 0,00%        |

| NO       |          |          |          |   |    | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                                                                | Pagu                 | Realisasi          | %            |
|----------|----------|----------|----------|---|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------|
|          |          |          |          |   |    | Anggaran Kas dan SPD                                                                                                                                                                       |                      |                    |              |
| 2        | 2        | 0        | 3        | 0 | 5  | Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya                                                | 404.848.400          |                    | 0,00%        |
| 2        | 2        | 0        | 3        | 0 | 7  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | 631.832.200          | 93.401.875         | 14,78%       |
| 2        | 2        | 0        | 3        | 0 | 8  | Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas                    | 589.571.300          |                    | 0,00%        |
| 2        | 2        | 0        | 3        | 0 | 10 | Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan                              | 1.000.000            |                    | 0,00%        |
| <b>2</b> | <b>2</b> | <b>0</b> | <b>4</b> |   |    | <b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>                                                                                                                  | <b>2.671.638.502</b> | <b>207.398.818</b> | <b>7,76%</b> |
| 2        | 2        | 0        | 4        | 0 | 1  | Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah                                                                                                                     | 1.000.000            |                    | 0,00%        |
| 2        | 2        | 0        | 4        | 0 | 2  | Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban                                                                            | 330.735.212          | 48.309.000         | 14,61%       |
| 2        | 2        | 0        | 4        | 0 | 3  | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran                                                                                       | 560.726.990          | 153.313.000        | 27,34%       |
| 2        | 2        | 0        | 4        | 0 | 4  | konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                                                             | 770.670.000          | 5.776.818          | 0,75%        |
| 2        | 2        | 0        | 4        | 0 | 5  | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah                                                                                                                                       | 1.006.506.300        |                    | 0,00%        |

| NO |   |   |   |   |    | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                                | Pagu                   | Realisasi | %            |
|----|---|---|---|---|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|--------------|
|    |   |   |   |   |    | tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi |                        |           |              |
| 2  | 2 | 0 | 4 | 0 | 9  | Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah                                                            | 1.000.000              |           | 0,00%        |
| 2  | 2 | 0 | 4 | 0 | 11 | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi                                                                                  | 1.000.000              |           | 0,00%        |
| 2  | 2 | 0 | 5 |   |    | <b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>                                                                                             | <b>745.083.708.509</b> |           | <b>0,00%</b> |
| 2  | 2 | 0 | 5 | 0 | 4  | Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah                                                         | 47.206.923.484         |           | 0,00%        |
| 2  | 2 | 0 | 5 | 0 | 8  | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan                                                                                                       | 46.356.898.400         |           | 0,00%        |
| 2  | 2 | 0 | 5 | 0 | 9  | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak                                                                                                                      | 22.180.954.686         |           | 0,00%        |
| 2  | 2 | 0 | 5 | 0 | 10 | Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi                                                                                                                       | 629.338.931.939        |           | 0,00%        |

Sumber : SPJ Belanja – Fungsional Februari 2025

## B. Kinerja Badan Keuangan Daerah berdasarkan Program dan Kegiatan

Hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan Kinerja Badan Keuangan Daerah sebagai berikut:

Sampai dengan 28 Februari 2025, hasil pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT terdiri dari 13 kegiatan dan 74 sub kegiatan dimana setiap kegiatan dan sub kegiatan terbagi dalam 2 (dua) program, dapat dijelaskan sebagai berikut :

### 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program ini secara teknis menjadi tanggungjawab Sekretariat Badan Keuangan Daerah adapun Pagu sebesar Rp. 18.188.331.972,- Terealisasi sebesar Rp. 490.416.427,- dengan presentase (2,70%);

**a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD**

Sub Bagian PDE bertanggungjawab untuk menangani kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Pelaksanaan pengumpulan data statistik sektoral daerah, dan Penyelenggaraan validasi data pendukung statistik sektoral daerah. Pagu sebesar Rp. 409.894.096,- Realisasi sebesar Rp. 58.310.000,-(14,23%). Hasil (output) pelaksanaan kegiatan:

- ⇒ Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun Anggaran 2023 .
- ⇒ Tersusunnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ).
- ⇒ Tersusunnya LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah).
- ⇒ Terlaksananya Pelaporan Realisasi Keuangan dan fisik serta monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian target RPSMD secara tahunan, pencapaian renstra secara tahunan, dan target indikator secara bulanan dan triwulan kepada Bapperida melalui aplikasi e. Monev performance.
- ⇒ Terlaksananya Beberapa fungsi dari pimpinan berupa:
  - a) Penyusunan materi rapat.
  - b) Mewakili pimpinan untuk mengikuti rapat maupun kegiatan lainnya.
  - c) Tugas-Tugas Lainnya.

**b. Sub Kegiatan Administrasi Keuangan**

Sub Bagian Keuangan bertanggungjawab menangani kegiatan Administrasi Keuangan Daerah dengan sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD,

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD, dan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran. Pagu sebesar Rp. 11.562.328.600,- Realisasi Rp. 69.007.200,-(0,60%) Hasil (output) pelaksanaan kegiatan:

- ⇒ Tersusunnya Laporan Realisasi Keuangan.
- ⇒ Terjawabnya temuan Inspektur Jenderal.
- ⇒ SPP/SPM-GU kepada pengguna Anggaran.
- ⇒ SPP/SPM-GU kepada BUD.
- ⇒ SPJ fungsional kepada PPK SKPD untuk divirifikasi.
- ⇒ SPJ Administrasi kepada PPK SKPD untuk divirifikasi.
- ⇒ Pengisian buku cek dan pengembalian tunai uang kas di Bank .
- ⇒ Menerima dan menyimpan uang persediaan .
- ⇒ Membukukan penyeteroran atas pungutan Pajak.
- ⇒ Membuat rekapitulasi data realisasi belanja bunga, belanja DBH, bantuan keuangan dan BTT.

**c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah**

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum bertanggungjawab menangani kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, yang terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD dan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD. Pagu sebesar Rp. 20.000.000,- Realisasi Rp 4.264.000,- (21,32%). Hasil (output) pelaksanaan kegiatan :

- ⇒ Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah.
- ⇒ Tersusunnya rencana kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD).

**d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum bertanggungjawab menangani kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terdiri dari Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian, Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian



Kinerja Pegawai dan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi. Pagu sebesar Rp. 335.843.000,- Realisasi Rp. 34.981.860,- (10,42%). Hasil (output) pelaksanaan kegiatan :

- ⇒ Tersusunnya Laporan Budaya Kerja.
- ⇒ Penyelesaian Dokumen Kenaikan Pangkat.
- ⇒ Penyelesaian Dokumen Pensiun.
- ⇒ Tersusunnya Laporan Presentasi Kehadiran.
- ⇒ Pengusulan Pensiun.
- ⇒ Penyusunan Laporan Implementasi SPBE Tahun 2023.
- ⇒ Pengusulan Kenaikan Pangkat .
- ⇒ Penginputan Anjab ABK Tahun 2025 Pada Aplikasi Sinjab 3.8.

**e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**

Sub Bagian Keuangan bertanggungjawab menangani kegiatan Administrasi Umum PD yang terdiri dari Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Penyediaan Bahan/Material, Fasilitas Kunjungan Tamu, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD. Pagu sebesar Rp. 1.600.775.956,- Realisasi Rp. 274.672.088,-(17,16%). Hasil (output) pelaksanaan kegiatan :

- ⇒ Tersedianya Peralatan Rumah Tangga.
- ⇒ Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan.
- ⇒ Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
- ⇒ Tersedianya Bahan/Material.

**f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum bertanggungjawab menangani kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sub Kegiatan

Pengadaan Mebel dan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya. Pagu sebesar Rp. 234.824.000,-Realisasi Rp.0 ,- (0%).

**g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum bertanggungjawab menangani kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Melebihi Pagu Validasi. Pagu sebesar Rp. 3.723.846.320,- Realisasi

Rp. 2.542.000,- (0,07%). Hasil (output) pelaksanaan kegiatan:

⇒ Tersedianya Jasa Surat Menyurat.

**h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum bertanggungjawab menangani kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya, dan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya. Pagu sebesar Rp 300.820.000,- Realisasi

Rp. 46.639.279,- (15,50). Hasil (output) pelaksanaan kegiatan :

⇒ Tersedianya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.

## **2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah**

Program Pengelolaan Keuangan Daerah ditangani oleh 4 Bidang yaitu Bidang Anggaran, Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota, Bidang Perbendaharaan dan Bidang Akuntansi dan Pelaporan. Dari pagu sebesar Rp. 763.446.432.137,- Realisasi Rp.847.955.527,- Presentase (0,11%). Berikut adalah realisasi kinerja per kegiatan :

### **a. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**

Kegiatan ini ditangani oleh Bidang Anggaran dengan Pagu sebesar Rp. 11.036.154.325,- Realisasi Rp.422.477.454,- (3,83%). Hasil (output) pelaksanaan kegiatan :

1. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD;
2. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran;
3. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS;
4. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD;
5. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS;
6. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA;
7. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD.

Tabel 3.10

**Hasil Pelaksanaan Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah**  
**Kondisi 28 Februari 2025**

| Program                             | Rincian Kegiatan                                                                                                              | Target (dokumen/kegiatan /buku)                                                                                                 | Realisasi (dokumen/kegiatan /buku) | Keterangan  |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|
| (1)                                 | (2)                                                                                                                           | (3)                                                                                                                             | (4)                                | (5)         |
| Program Pengelolaan Keuangan Daerah | 1. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi Serta Kebijakan Bidang Anggaran                                                         | - Undangan Rapat terkait Pembahasan Progres Penyiapan Dokumen Pendukung TPP sesuai Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing Tim TPP | Pembahasan ini sudah dilaksanakan  | Terealisasi |
|                                     | 2. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD | - Melakukan Pembahasan terkait Skenario Pergeseran Pertama APBD Tahun Anggaran 2025                                             | Pembahasan ini sudah dilaksanakan  | Terealisasi |
|                                     |                                                                                                                               | - Melakukan Pembahasan dalam rangka pelaksanaan visi, misi, Program/Kegiatan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT Priode 2025-       | Pembahasan ini sudah dilaksanakan  | Terealisasi |

|  |  |                                                                                                                               |                                    |             |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|
|  |  | 2029                                                                                                                          |                                    |             |
|  |  | - Melakukan Pemetaan Pagu Per SKPD sementara untuk Persiapan Perubahan APBD Pertama                                           | Pemetaan ini sudah dilaksanakan    | Terealisasi |
|  |  | - Melakukan Penginputan Laporan DAU Spesifik Grant dan Sisa Lebih Perhitungan DAU Spesifik Grant Tahun Anggaran 2024 & 2023   | Penginputan ini sudah dilaksanakan | Terealisasi |
|  |  | - Melakukan Pembahasan terkait Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai kebijakan Pusat dan Daerah | Pembahasan ini sudah dilaksanakan  | Terealisasi |

**b. Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota**

Kegiatan ini ditangani oleh Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota dengan Pagu sebesar Rp 2.272.027.005,- Realisasi Rp. 37.358.000,- (1,64%). Hasil (output) pelaksanaan kegiatan dijelaskan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.11

**Hasil Pelaksanaan Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota Badan Keuangan  
Daerah Kondisi 28 Februari 2025**

| NO                                                         | PROGRAM/<br>KEGIATAN<br>/RINCIAN KERJA                                                                                                                                                                                           | BENTUK/<br>WUJUD | REALISASI | KETERANGAN                                                                                     |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROGRAM : PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>               |                                                                                                                                                                                                                                  |                  |           |                                                                                                |
| <b>KEGIATAN : PEMBINAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b> |                                                                                                                                                                                                                                  |                  |           |                                                                                                |
| (1)                                                        | (2)                                                                                                                                                                                                                              | (4)              | (5)       | (6)                                                                                            |
| A.                                                         | Sub kegiatan :<br>Evaluasi Rancangan<br>Peraturan Daerah tentang<br>APBD Kabupaten/Kota dan<br>Rancangan Peraturan<br>Kepala Daerah tentang<br>Penjabaran APBD<br>Kabupaten/Kota dengan<br>rincian kegiatan sebagai<br>berikut : |                  |           | Kegiatan akan<br>dilaksanakan pada<br>bulan Oktober<br>sampai dengan<br>bulan Desember<br>2025 |
| B.                                                         | Sub kegiatan :<br>Evaluasi Rancangan<br>Peraturan Daerah tentang<br>Perubahan APBD<br>Kabupaten/Kota dan<br>Rancangan Peraturan<br>Kepala Daerah tentang<br>Penjabaran Perubahan<br>APBD Kabupaten/Kota                          |                  |           | Kegiatan akan<br>dilaksanakan pada<br>bulan Juli sampai<br>dengan Oktober<br>2025              |
| C.                                                         | Sub kegiatan :<br>Evaluasi Rancangan<br>Peraturan Daerah tentang<br>Pertanggungjawaban<br>Pelaksanaan APBD                                                                                                                       |                  |           | Kegiatan akan<br>dilaksanakan pada<br>bulan Mei sampai<br>dengan Agustus<br>2025               |

|    |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                  |                                                                                                                                                                       |                                                                                          |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dengan rincian kegiatan sebagai berikut :                                      |                                                                                                  |                                                                                                                                                                       |                                                                                          |
| D. | Sub kegiatan :<br>Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota dengan rincian kegiatannya yaitu Rapat Koordinasi Keuangan Daerah                                                                         |                                                                                                  |                                                                                                                                                                       |                                                                                          |
| E. | Sub kegiatan :<br>Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasi Laporan Keuangan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah dengan rincian kegiatan sebagai berikut : |                                                                                                  |                                                                                                                                                                       |                                                                                          |
|    | 1. Program Pengelolaan Keuangan daerah dengan rincian kegiatan Rekapitulasi Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada 22 Kabupaten/Kota                                                                       | List rekapan LRA Kabupaten/Kota keadaan sampai dengan 28 Februari 2025 sebanyak 1 (satu) dokumen | 1 (satu) list rekapan LRA Kabupaten/Kota dan telah dikirimkan kepada Kemendagri, Bank Indonesia dan Kanwil Perbendaharaan Provinsi NTT serta Kantor DJP Pajak Pratama | Berlanjut untuk bulan Februari Tahun 2025 yang akan dilaporkan di bulan Maret Tahun 2025 |
|    | 2. Menyusun Data Statistik                                                                                                                                                                                | Draf daftar/list                                                                                 | Draf data Statistik                                                                                                                                                   | Berlanjut untuk                                                                          |

|    | Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2023                                       | Data Statistik Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2023 | Keuangan Daerah Tahun 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | bulan-bulan berikutnya                                                                                          |
|----|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F. | Sub kegiatan :<br>Asistensi Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota      |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                 |
|    | 1. Pelaksanaan kegiatan FGD pengelolaan keuangan berbasis elektronik BLUD | FGD pengelolaan keuangan berbasis elektronik BLUD  | FGD pengelolaan keuangan berbasis elektronik BLUD dengan dihadiri secara zoom meeting oleh peserta dari 22 (duapuluhdua) Kabupaten/Kota dan Narasumber antara lain:<br>1. Plt Kepala Badan Keuangan Provinsi NTT yang membawakan materi tentang Gambaran Umum BLUD di Provinsi NTT<br>2. Plt Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan yang membawakan materi tentang Penguatan Kelembagaan BLUD<br>3. Kepala Sub Direktorat BLUD Kemendagri | Pelaksanaan FGD pengelolaan keuangan BLUD dilaksanakan pada hari Senin, 17 Februari 2025 pukul 8.00 s/d selesai |



|    |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                 |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                    | Perwakilan tim teknis elektronik BLUD Universitas Indonesia.                                                                                                    |  |
|    | 2. Penyusunan Laporan Kegiatan FGD pengelolaan keuangan berbasis elektronik BLUD                                                                                                                                           | Laporan Kegiatan FGD pengelolaan keuangan berbasis elektronik BLUD                                                                                 | Adanya 1 (satu) Laporan Kegiatan FGD pengelolaan keuangan berbasis elektronik BLUD                                                                              |  |
| G. | Asistensi Pengelolaan Keuangan DBH-CHT Kab/Kota                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                 |  |
|    | 1. Penyampaian Surat Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 900.1/344/BKUD5.2 Tanggal 17 Februari 2025 hal Permintaan Data Salur DBH CHT TA 2024 yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri c.q Dirjen Perimbangan Keuangan RI | Surat Permintaan Data salur DBH-CHT Tahun Anggaran 2024 Nomor 900.1/344/BKUD5.2 Tanggal 17 Februari 2025 hal Permintaan Data Salur DBH CHT TA 2024 | Terinformasinya data salur DBH CHT TA 2024                                                                                                                      |  |
|    | 2. Penyampain Laporan Konsolidasi Pemanfaatan DBH-CHT TA 2024 Nomor 900.1/346/BKUD5.2 Tanggal 17 Februari 2025                                                                                                             | Laporan Konsolidasi Pemanfaatan DBH-CHT TA 2024 Nomor 900.1/346/BKUD5.2 Tanggal 17 Februari 2025                                                   | Terinformasinya realisasi penggunaan DBH CHT Provinsi Nusa Tenggara Timur ke Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. Dirjen Perimbangan Keuangan di Jakarta |  |
| H. | Sub kegiatan :<br>Pelaksanaan Kegiatan Umum dengan rincian kegiatan sebagai berikut :                                                                                                                                      |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                 |  |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  | 1. Penyusunan laporan kegiatan bulan Februari 2025                                                                                                                                                                                                                                                                       | Laporan kegiatan bulan Februari 2025                                                                                                                                                                                                                                                                        | Disampaikannya laporan kegiatan bidang pembinaan kab/kota bulan Februari 2025 kepada Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT                                                                                                                                       | Telah disampaikan ke Sekretariat Badan Provinsi NTT pada hari Senin 17 Maret 2025 |
|  | 2. Mengikuti Rapat Pembahasan kesepakatan bersama dan perjanjian Kerja sama (PKS) antara Pemerintah Kabupaten Kupang, Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan RSUD Prof. DR.W.Z Johannes Kupang tentang Pelayanan Kesehatan Rujukan bagi peserta Program Jaminan Persalinan | Rapat Pembahasan kesepakatan bersama dan perjanjian Kerja sama (PKS) antara Pemerintah Kabupaten Kupang, Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan RSUD Prof. DR.W.Z Johannes Kupang tentang Pelayanan Kesehatan Rujukan bagi peserta Program Jaminan Persalinan | Adanya perjanjian Kerja sama (PKS) antara Pemerintah Kabupaten Kupang, Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan RSUD Prof. DR.W.Z Johannes Kupang tentang Pelayanan Kesehatan Rujukan bagi peserta Program Jaminan Persalinan | Rapat dilaksanakan pada hari Jumat, 28 Februari 2025 Pukul 9.00 s/d selesai       |
|  | 3. Konsultasi dari BPPKAD Kabupaten Kupang, Kabupaten Flotim,                                                                                                                                                                                                                                                            | Konsultasi dari BPPKAD Kabupaten                                                                                                                                                                                                                                                                            | Terinformasinya berbagai hal terkait pengelolaan keuangan                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   |

|    |                                                                                                            |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|    | kabupaten TTS, Kabupaten Sumba Timur,                                                                      | Kupang, Kabupaten Flotim, kabupaten TTS, Kabupaten Sumba Timur, terkait pengelolaan keuangan daerah | daerah baik dari sisi perencanaan penganggaraaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |
| I. | Tugas Tambahan :<br>Melaksanakan tugas sebagai Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah dengan rincian :          |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |
|    | 1. Penyelesaian administrasi umum dan kepegawaian (Kenaikan Berkala, SKP Tahun 2023 maupun SKP Tahun 2024) | Dokumen SKP, Kenaikan Berkala dan SKP 2024                                                          | Tersedianya 3 jenis dokumen untuk ditindaklanjuti secara berkala                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Berlanjut untuk bulan Maret 2025                 |
|    | 2.Mengikuti Rapat Paripurna ke-22 terkait Pidato Perdana Gubernur NTT Periode 2025-2030                    | Rapat Paripurna ke-22 terkait Pidato Perdana Gubernur NTT Periode 2025-2030                         | Adanya informasi rencana pembangunan provinsi NTT 5 (lima) Tahun kedepan dengan visi mewujudkan NTT yang maju, sehat, cerdas, sejahtera dan berkelanjutan dengan misi yakni,<br>1. memastikan infrastruktur berkelanjutan demi mewujudkan ekonomi berbasis potensi daerah yang berdaya saing<br>2. memperluas pelayanan kesehatan dan jaminan social | Rapat dilaksanakan pada hari Senin, 3 Maret 2025 |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | <p>yang lebih inklusif, terjangkau dan mudah di akses</p> <p>3. menghadirkan pendidikan berkualitas yang merata, partisipatif, dan tepat sasaran</p> <p>4. mewujudkan kesejahteraan social, kesetaraan akses, serta kualitas hidup yang berkeadilan dan madani bagi seluruh lapisan masyarakat serta mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pengelolaan SDA dan SDM yang bijak, serta pemenuhan HAM untuk melanjutkan masa depan yang indlusif.</p> |  |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

**c. Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**

Kegiatan ini ditangani oleh Bidang Perbendaharaan dengan Pagu sebesar Rp. 2.382.903.796,- Realisasi Rp. 180.721.255,- (7,58%). Hasil (output) pelaksanaan kegiatan dijelaskan dalam tabel berikut ini:

**1. Selaku Bendahara Umum Daerah (BUD)**

Saldp awal Rp. 368.177.700.043,98 realisasi Penerimaan sebesar Rp.178.635.088.371,36 sedangkan Realisasi Pengeluaran sebesar Rp.230.624.167.158,- dan sisa saldo RKUD per 28 Februari 2025 sebesar Rp.316.188.621.257,34,-.

2. Realisasi Keuangan khusus Bidang Perbendaharaan dengan anggaran sebesar Rp.2.382.903.796,- terealisasi Rp. 180.721.255,- atau 8 % yang terdiri dari:
- Sub Kegiatan 02.1.03.0001 Koordinasi dan pengelolaan Kas Daerah terealisasi Rp. 87.319.380,- atau 21 % dari anggaran sebesar Rp.433.044.296,-
  - Sub Kegiatan 02.1.03.0003 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD anggaran sebesar Rp.322.607.600,-
  - Sub Kegiatan .02.1.03.0005 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer lainnya anggaran sebesar Rp.404.848.400,-
  - Sub Kegiatan 02.1.03.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah terealisasi Rp. 93.401.875,- atau 15 % dari anggaran sebesar Rp.631.832.200,-
  - Sub Kegiatan 02.1.03.0008 Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas anggaran sebesar Rp.589.571.300,-
  - Sub Kegiatan 02.1.03.0010 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan Yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan anggaran sebesar Rp. 1.000.000,-

Tabel 3.12

## Hasil Pelaksanaan Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan Daerah

Kondisi 28 Februari 2025

| PROGRAM                     | KEGIATAN                                         | BENTUK/WUJUD                                                                                                                                         | REALISASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | KET |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Pengelolaan Keuangan Daerah | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | Menerima, memverifikasi dan memproses SPP/SPM dari Perangkat Daerah (PD) Lingkup Pemprov. NTT dan selanjutnya diproses menjadi SP2D.                 | Belanja Daerah<br>Terdiri Dari SP2D : 190 Doc<br>LS Gaji PNSD 59 Doc<br>& Guru (Gaji Induk)<br>LS Terusan gaji 22 Doc<br>LS Kekurangan 1 Doc<br>Tj. Fungsional<br>LS Gaji 3 Doc<br>Susulan<br>LS Gaji PPPK 6 Doc<br>GU 4 Doc<br>UP 19 Doc<br>LS Gaji Staf 2 Doc<br>khusus<br>LS Honorer 67 Doc<br>LS DPRD 2 Doc<br>LS Barang dan 5 Doc<br>Jasa |     |
|                             |                                                  | Membuat Laporan Bulanan tentang :<br>- Data Belanja Gaji Pegawai dan TPP Bulan Oktober Tahun Anggaran 2024 untuk Perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) | SuratPengantar :<br>1. 900.1.3/2626/BKUD3.1<br>Tgl. 11 November 2024                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | <p>- Data Belanja Gaji PPPK dan TPP Bulan Oktober Tahun Anggaran 2024 untuk Perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU)</p> <p>Ke Menteri Keuangan Republik Indonesia<br/>c.q Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK)</p> |                                                                                                                                                           |  |
|  |  | Membuat SKPP (Pensiun BUP, Pensiun Dini, Janda Duda dan Pindah)                                                                                                                                                           | <p>SKPP BUP Doc : 41 SK</p> <p>SKPP : 12 SK</p> <p>Meninggal</p> <p>SKPP Pindah : - SK</p> <p>Pensiun Dini : - SK</p>                                     |  |
|  |  | Menginput Perubahan data Gaji PNSD dan Guru SMA/SMK se Prov. NTT                                                                                                                                                          | <p>Perubahan Gaji, Berkala/Naik Pangkat:</p> <p>PNS : 292 Orang</p> <p>Guru : 545 Orang</p> <p>PPPK Tahap I : 9 Orang</p> <p>PPPK Tahap II : 25 Orang</p> |  |
|  |  | Pembayaran Gaji Rutin Bulanan bagi PNS Lingkup Pemprov. NTT TA.                                                                                                                                                           | <p>- Verifikasi berkas</p> <p>- Penginputan data dalam Aplikasi SIM Gaji Taspen</p> <p>- Pencetakan Daftar Gaji</p>                                       |  |

|  |  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | 2025                                                                                                                                                                                      | - Pencetakan SP2D<br>- Realisasi Pembayaran                                                                            |  |
|  |  | Mengentri Buku Bantu Rekening Kas Daerah Provinsi NTT                                                                                                                                     | Penerimaan : 4.496 Doc<br>Pengeluaran : 190 Doc                                                                        |  |
|  |  | Menginput Data Bukti Setoran dan SP2D dalam B IX                                                                                                                                          | 4.496 Doc                                                                                                              |  |
|  |  | Melakukan Rekapitulasi dan penyeteroran PFK (Perhitungan Fihak Ketiga), yang terdiri dari beras, Taspen, Iuran Kesehatan, Iuran Ketenaga kerjaan, PPh Ps. 21, Taperum, PPN dan PPh Ps. 22 | PNS pada 35 OPD<br>Lingkup Pemprov.<br>NTT, OPD Pengalihan 3<br>Kab/Kota dan Guru<br>SMA/SMK Pengalihan 22<br>Kab/Kota |  |
|  |  | Melakukan verifikasi terhadap SP2D yang akan dilakukan pencairan                                                                                                                          | 190 SP2D                                                                                                               |  |
|  |  | Melakukan pengiriman Daftar Transaksi Harian (DTH) dan Rekapitulasi Transaksi Harian (RTH) Bulan Januari 2025 ke                                                                          | Surat Pengantar Nomor :<br>900.1.13.1/376/BKUD3.1<br>900.1.13.1/377/BKUD3.1<br>Tanggal 24 Februari 2025                |  |



|  |                               |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                   |  |
|--|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                               | KPP Pratama<br>Kupang                                                                                                                     |                                                                                                                                                   |  |
|  |                               | Melakukan Pengiriman Daftar Rekapitulasi, bukti billing iuran wajib pegawai dan bukti billing iuran asuransi kesehatan bulan Januari 2025 | Surat Pengantar Nomor :<br><br>1. 900.1.13.1/301/BKUD3.1<br>2. 900.1/302/BKUD3.3<br>Tgl . 11 Februari 2025                                        |  |
|  | <b>Pengagendaan<br/>Surat</b> | Surat Masuk<br>Surat Keluar                                                                                                               | Total = 166 Surat<br>Total = 9 Surat                                                                                                              |  |
|  |                               | Melakukan pengiriman bukti pembayaran beras ke Bulog Bulan Januari 2025                                                                   | 33 Setoran                                                                                                                                        |  |
|  |                               | Rekapitulasi LHP BPK RI dan Inspektorat Daerah Prov. NTT Keadaan Desember 2024                                                            | LHP BPK RI (29 kasus) Nominal Rp. 149.409.137,-<br>LHP Inspektorat Daerah Prov. NTT ( 749 kasus) Nominal Rp. 7.477.510.227,-<br>Rincian terlampir |  |
|  |                               | Penginputan perubahan gaji tanggal 1-10 setiap bulannya pada SIM Gaji Web                                                                 | Tepat waktu                                                                                                                                       |  |
|  |                               | Operator pada Aplikasi Gaji melakukan Print                                                                                               | Untuk dibayarkan pada gaji bulan MARET                                                                                                            |  |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | daftar gaji                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                |  |
|  |  | <p>Pelaporan DAU harus di upload melalui aplikasi SINERGI (sofcopy &amp; hardcopy) yang sudah ditandatangani dan cap basah oleh pejabat yang berwenang, pengiriman paling lambat tanggal 14 setiap bulannya. Apabila tidak dipenuhi maka penyampaian DAU bulan berikutnya di tunda</p> | <p>Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak pernah terlambat menyampaikan laporan DAU</p> |  |
|  |  | <p>Penyusunan Laporan Progres Penyerapan Dana Pinjaman Ekonomi (PEN) Daerah antara PT. SMI dan Pemprov. NTT yang dikirim paling lambat setiap tanggal 10 setiap bulannya dan laporan tersebut harus terlebih dahulu sudah di reviu</p>                                                 | <p>Selalu tepat waktu</p>                                                                      |  |

|  |  |                                                                            |  |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  | oleh Inspektorat daerah sebelum dikirim ke PT. SMI melalui aplikasi REVINA |  |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------|--|--|

**d. Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**

Kegiatan ini ditangani oleh Bidang Akuntansi dan Pelaporan dengan Pagu sebesar Rp. 2.671.638.502,- Realisasi Rp 207.398.818,- (7,76%) . Hasil (output) pelaksanaan kegiatan:

**1. DAP Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT TA. 2025**

Program Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan kegiatan koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah yang terdiri dari sub – sub kegiatan antara lain :

- a. Sub kegiatan koordinasi pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan pengeluaran kas Daerah dengan jumlah anggaran senilai Rp. 1.000.000,- sampai dengan tanggal 28 Februari 2025 terealisasi senilai Rp. 0,00,- atau 0 %.
- b. Sub kegiatan rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan-lo, dan beban jumlah anggaran sebesar Rp. 330.735.212,- sampai dengan tanggal 28 Februari 2025 terealisasi Rp.48.309.000,- atau (14.61%).
- c. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran dengan jumlah Anggaran sebesar Rp.560.726.990,- dan sampai dengan 28 Februari 2025 realisasi Sebesar Rp.153.313.000,- Atau (27,34%) Hasil (output) pelaksanaan kegiatan :
- d. Sub kegiatan konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 770.670.000,- sampai dengan tanggal 28 Februari 2025 terealisasi sebesar Rp.5.776.818,- atau (0,75%).

- ⇒ Tersusunnya Laporan keuangan pemerintah Daerah (LKPD) TA. 2023 (Unaudited).
  - ⇒ Tersusunnya laporan keuangan SKPD TA.2023 (Unaudited).
  - ⇒ Tersusunnya laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA. 2023 (Audited).
  - ⇒ Tersusunnya Laporan keuangan SKPD TA.2023(Audited)
- e. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi NTT, dianggarkan sebesar Rp.1.006.506.300,- dan realisasi sampai dengan tanggal 28 Februari sebesar Rp.0,00,- atau 0% Hasil (ouput) pelaksanaan kegiatan:
- ⇒ Tersusunnya Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD provinsi NTT TA.2023.
  - ⇒ Tersusunnya rancangan peraturan Gubernur tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD provinsi NTT TA.2023.
  - ⇒ Tersusunnya Peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi NTT TA 2023.
  - ⇒ Tersusunnya Peraturan Gubernur tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi NTT TA 2023.
- f. Sub kegiatan penyusunan kebijakan dan paduan teknis oprasional penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah dengan jumlah anggaran senilai Rp. 1.000.000,- sampai dengan 28 Februari 2025 realisasi Sebesar Rp.0,00,- Atau 0% Hasil (output) pelaksanaan kegiatan :
- g. Sub Kegiatan pembinaan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi dengan jumlah anggaran senilai Rp. 1.000.000,- sampai dengan 28 Februari 2025 realisasi Sebesar Rp.0,00,- Atau 0% .

**Tabel 3.13**  
**Realisasi Fisik Pelaksanaan Program dan Kegiatan**  
**Bidang Akuntansi dan Pelaporan**  
**Kondisi per 28 Februari 2025**

| <b>Program</b>                                                                           | <b>Rincina Kegiatan</b>                                                                                                       | <b>Target (dokumen/ kegiatan)</b>                                             | <b>Realisasi (dokumen/ kegiatan)</b> | <b>Ket</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|
| Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Akuntansi & Pelaporan Keuangan Daerah | 1. Sub kegiatan Kooordinasi pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah.                                      | 1 Laporan                                                                     |                                      |            |
|                                                                                          | 2. Sub kegiatan rekonseliasi dan ferifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja,pembiayaan.p endapata-lo, dan Beban | 3 Dokumen                                                                     |                                      |            |
|                                                                                          | 3. Sub kegiatan koordinasi penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan semesteran .          | 3 Dokumen<br>1.Laporan Bulanan.<br>2.Laporan Triwulan.<br>3.Laporan semester. |                                      |            |
|                                                                                          | 4. Sub kegiatan konsolidasi laporan keuangan SKPD,BLUD dan Laporan Keuangan                                                   | 4 Dokumen<br><br>1. 35 Lk SKPD<br>2. 4 Lk BUMD<br>3. 1 LKPD                   |                                      |            |

| <b>Program</b> | <b>Rincina Kegiatan</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>Target (dokumen/ kegiatan)</b>                                     | <b>Realisasi (dokumen/ kegiatan)</b> | <b>Ket</b> |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|
|                | Pemerintah Daerah                                                                                                                                                                                                               |                                                                       |                                      |            |
|                | 5. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi NTT | 4 Dokumen<br><br>1. Ranperda<br>2. Ranpergub<br>3. Perda<br>4. Pergub |                                      |            |
|                | 6. Sub kegiatan penyusunan kebijakan dan paduan teknis oprasional penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah                                                                                                                   | 1 Dokumen                                                             |                                      |            |
|                | 7. Sub Kegiatan pembinaan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi                                                                                                                                       | 35 SKPD                                                               |                                      |            |

**e. Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**

Kegiatan ini ditangani oleh Sub Bagian Keuangan, terdiri dari Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah dan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan dan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak dengan Pagu sebesar

Rp. 745.083.708.509,- Realisasi Rp .0,- (0%). Hasil (output) pelaksanaan kegiatan:

- ⇒ Laporan hasil Analisis Perencanaan dan pelaksanaan pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman Pemerintah daerah .
- ⇒ Laporan Hasil Analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan.
- ⇒ Laporan hasil pengelolaan darurat dan mendesak .
- ⇒ Laporan hasil pengelolaan dana bagi hasil Provinsi.

## **BAB IV**

### **PERMASALAHAN DAN SOLUSI**

#### **4.1 Permasalahan dan Solusi**

Dalam proses pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang pada Badan Keuangan Daerah terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi. Adapun permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

##### **1. Sekretariat**

###### **a. Permasalahan**

1. Sebagian besar (bidang/sub bidang/sekretariat/sub bagian) belum menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan tepat waktu sehingga terjadi keterlambatan.
2. Ketersediaan ASN yang masih terbatas.
3. Kurangnya bimtek atau diklat karena kurangnya ketersediaan dana
4. Arsip data masing-masing pegawai belum terkumpul seluruhnya. Hal ini dikarenakan pegawai yang bersangkutan belum menyerahkan arsipnya pada Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
5. Penanganan disiplin pegawai belum optimal. Beberapa kasus pegawai yang tidak disiplin sering kali terlambat dilaporkan, sehingga proses penyelesaian menjadi lebih rumit.

###### **b. Solusi**

1. Masing-masing bidang/sub bidang/sub bagian segera menyampaikan Laporan Bulanan paling lambat satu minggu setelah diminta.
2. Mengusulkan penambahan ASN untuk ditempatkan pada Sekretariat.
3. Ditambah dana untuk bimtek dan diklat untuk seluruh pegawai
4. selalu menyampaikan informasi terkait pengumpulan kelengkapan arsip data pegawai melalui Nota Dinas maupun WA grup
5. Memberikan sanksi yang tegas dan konsisten terhadap pegawai yang indisipliner.
6. Atasan langsung rutin melakukan pengawasan terhadap kehadiran pegawai pada unit kerjanya, dan segera melaporkan kepada



Kasubag Kepegawaian dan Umum apabila terdapat pegawai di unitnya yang melakukan tindakan indisipliner

7. Perlu adanya penyampaian informasi dan rekomendasi dari atasan agar setiap pegawai memiliki minat dan semangat untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan melalui Bimtek maupun Diklat.

## **2. Bidang Anggaran**

### **a. Permasalahan**

1. Permasalahan yang Dihadapi terkait Batas Waktu Penyampaian Dokumen Laporan Rancangan Penggunaan Anggaran DAU Spesifik Grant Tahun 2024 dan Laporan Sisa Lebih Perhitungan DAU Spesifik Grant Tahun 2023 Merupakan Syarat Penyaluran DAU Spesifik Grant Tahun 2025 namun SKPD Pengelola DAU Spesifik Grant belum Menyampaikan Laporan dimaksud.
2. Terdapat beberapa kebijakan Pemerintah pusat dan Daerah yang Menyebabkan harus dilakukan penyesuaian dalam APBD melalui mekanisme pergeseran APBD yang menyebabkan Perubahan APBD antara lain :
  - a. Penyesuaian terhadap Perubahan Pendapatan Daerah sesuai Keputusan Kementrian Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang selanjutnya perlu dilakukan Penyesuaian terhadap belanja yang dimaksud;
  - b. Penyesuaian Program/Kegiatan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2025 sesuai surat edaran Kementrian dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025,

Selanjutnya Pemerintah Daerah segera menyesuaikan arah Kebijakan Pembangunan Daerah dengan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih serta Program Asta Cita kedalam Perubahan RKPD Tahun 2025 dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025;

- c. Penjabaran kembali Sisa Dau Spesifik Grant tahun sebelumnya sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangannomor 110 Tahun 2023 Tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya.

b. Solusi

1. Tim kerja bidang Anggaran selalu berkoordinasi dengan SKPD pengelola DAU Spesifik Grant guna mendorong percepatan penyusunan laporan penggunaan anggaran DAU Spesifik Grant tahun 2024 dan Sisa DAU Spesifik Grant tahun 2023.
2. Tim kerja bidang Anggaran menyampaikan Surat kepada SKPD untuk melakukan rasionalisasi sesuai kebijakan Pusat, melakukan Koordinasi dengan SKPD agar dapat segera menyampaikan hasil Rasionalisasi untuk melakukan Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**3. Bidang Perbendaharaan**

a. Permasalahan

1. Empat Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT untuk dapat segera menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) .
2. Pada akhir bulan Januari masih terdapat 20 OPD yang belum mengajukan UP (Uang Persediaan).
3. Masih ada OPD yang belum mengajukan SPP/SPM Tenaga Kontrak, untuk Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah SK yang terbit terdapat kekeliruan pada nominal gaji yang tidak sama, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan masih verifikasi di GTK.

b. Solusi

1. Badan Keuangan Daerah mengirimkan dokumen untuk kelengkapan penerbitan KKPD untuk 4 perangkat daerah: Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif , Badan Keuangan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, Inspektorat Daerah ke Bank NTT KCP Kantor Gubernur nomor 900.1/386/BKUD3 tanggal 24 Februari 2025.
2. Bulan Februari jumlah OPD yang sudah mencairkan UP sebanyak 19 OPD yang belum ada 1 (satu) yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
3. OPD yang belum mengajukan SPP/SPM LS untuk pembayaran gaji Tenaga Kontrak bulan Januari dan Februari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah SK sudah diproses perbaikan, untuk bulan Februari : Jasa Tendik SLB, Tenaga Guru SKO, Guru Kontrak SLB, Guru Kontrak SMA, Guru Kontrak SMK (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan).

**4. Bidang Akuntansi dan Pelaporan**

a. Permasalahan

Berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan pada bidang Akuntansidan Pelaporan permasalahan yang terjadi adalah penyerapan anggaran per 28 Februari 2025 untuk bidang akuntansi dan pelaporan sudah riil, mengikuti schedule/waktu pelaksanaan program/kegiatan.

**5. Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota**

a. Permasalahan

1. Belum tepat waktu Kabupaten/Kota menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) setiap bulan dalam Tahun Anggaran 2024.
2. Belum tepat waktunya Kab/Kota menyampaikan RKP DBH-CHT TA.2025.

b. Solusi

1. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota agar menyampaikan

LRA tepat waktu setiap bulan sesuai jadwal yang ditentukan melalui grup whatsapp maupun dihubungi secara langsung.

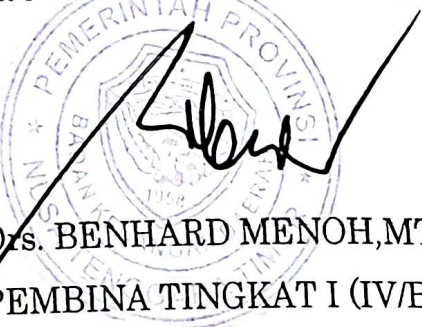
2. Pemerintah Provinsi NTT akan tetap melaksanakan fungsi koordinasi dan konsultatif yang intensif dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota agar dapat segera menyusun dan menyampaikan RKP DBH- CHT TA 2025 bagi kabupaten yang belum menyampaikan.

## BAB V PENUTUP

Demikian Laporan Kinerja Bulan Februari Tahun Anggaran 2025 Badan Keuangan Daerah ini disusun, sebagai bahan masukan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja pada lingkup Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025. Hal-hal lain yang belum dimuat dalam panduan ini akan dibahas saat evaluasi berlangsung.

Kupang, Maret 2025

Plt. KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

  
Drs. BENHARD MENO, MT  
PEMBINA TINGKAT I (IV/B)  
NIP. 19720512 199101 1 001